

PERSPEKTIF PERILAKU SOSIOLOGIS BIROKRASI DALAM PEMILU (Studi Perilaku Politik ASN Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo)

Ramli Mahmud^{1,*}, Sofyan Alhadar², Asmun Wantu³

^{1,2,3} Universitas Negeri Gorontalo

*Corresponding author: ramlimahmud33@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam reformasi birokrasi di Indonesia adalah netralitas ASN dalam setiap perhelatan demokrasi. Merujuk pada permasalahan dimaksud, studi tentang perilaku birokrasi sudah selayaknya menggunakan berbagai perspektif untuk menelaah mengapa fenomena ini tetap terjadi di setiap perhelatan Pemilu maupun Pilkada. Salah satu perspektif yang bisa digunakan sebagai pisau analisis adalah menggunakan pendekatan perilaku politik. Atas hak tersebut, salah satu aspek yang dapat dibaca lewat perilaku birokrasi pada saat Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo adalah menggunakan perspektif perilaku sosiologis. Adapun yang menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar ASN di jajaran struktural dan fungsional khususnya guru menentukan pilihan politiknya berdasarkan pada pertimbangan sosiologis. Diantara pertimbangan yang dimaksud antara lain, pekerjaan sebagai ASN, Kepatuhan terhadap kepala daerah, kekeluargaan dan afiliasi ASN dengan organisasi kemasyarakatan.

Kata Kunci : Perilaku Sosiologis, Perilaku Birokrasi, Pemilu

ABSTRACT

One of the problems faced in bureaucratic reform in Indonesia is the neutrality of ASN in every democratic event. Referring to the problem in question, a study of bureaucratic behavior should use various perspectives to examine why this phenomenon continues to occur in every election and regional election event. One perspective that can be used as an analytical knife is to use a political behavior approach. For this right, one aspect that can be read through the behavior of the bureaucracy during the 2019 General Election in Boalemo Regency is using the perspective of sociological behavior. The method used in this research is a qualitative method with a phenomenological approach. The results showed that most of the ASN in the structural and functional ranks, especially teachers, made their political choices based on sociological considerations.

Keywords: Sociological Behavior, Bureaucratic Behavior, Election

A. PENDAHULUAN

Preferensi politik seseorang pastinya dilatari oleh berbagai perspektif yang melatari perilakunya. Sebagai pendekatan utama dalam kajian perspektif perilaku politik, pendekatan sosiologis mengasumsikan bahwa pilihan mendukung serta menentukan pilihan litarai oleh pertimbangan sosiologis. Perspektif sosiologi atau dikenal dengan mazhab Columbia pertama kali melakukan penelitian tentang *voting* melalui dua karyanya, yaitu *The People's Choice* (1984) dan *voting* (1952) merupakan studi awal tentang perilaku politik. asumsi yang terbangun melalui kedua temuan tersebut memandang bahwa perilaku politik seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial, ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi tertentu, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal dan lain sebagainya.

Asumsi yang terbangun dari indikator tersebut menunjukkan bahwa preferensi atas pilihan politik seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dimana individu berada. Kecenderungan atas pertimbangan lingkungan sosial yang membentuk preferensi politik individu. Hubungannya dengan hal tersebut, birokrasi merupakan suatu lingkungan yang memiliki keberadaan struktur

dan sumber daya lainnya yang tidak dimiliki oleh lingkungan sosial pada umumnya. Dalam perspektif tertentu, acap kali birokrasi dikenal dengan kerajaan pejabat, yang terdiri atas hirarki, tugas, wewenang, tanggung jawab, reward dan control yang sering kali melampaui batas normal (Thoha, 2002:185). Dengan kondisi demikian, kelompok birokrasi dalam hal ini ASN semakin terpola pada lingkungan tertentu sehingga membuat mereka sangat sulit untuk dikendalikan.

Pada konteks ini, disinyalir bahwa birokrasi selalu mengedepankan tipe ideal rasionalnya. Lay (1998:31-36) bahwa Tipe ideal tersebut masih mengisahkan banyak masalah yang berasal dari kecenderungan setiap organisasi untuk mengembangkan pamrih atau kepentingan sendiri. Kecenderungan jabatan bagi birokrasi merupakan tujuan akhir dari karirnya, bukan sebagai sarana dalam mencapai tujuan organisasi. Konteks tipe ideal rasional seperti yang dikemukakan di atas juga tersirat dengan jelas melalui regulasi dan tata aturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Namun tidak selamanya regulasi tersebut dapat membatasi ruang gerak birokrasi dalam setiap agenda demokrasi, masih terdapat sebagian birokrasi terlibat langsung dengan agenda demokrasi, khususnya demokrasi ditingkat lokal.

Data laporan KASN bahwa sejak 2019-2020 kasus pelanggaran ASN terhadap Netralitas ASN mengalami peningkatan. Pemilu 2019, sekitar 412 yang diproses melalui KASN atas aparat birokrasi yang terlibat langsung dengan keterlibatan dan keberpihakan mereka atas calon dan partai tertentu. Sementara itu pada tahun 2020 terdapat 1399 kasus menyangkut dengan netralitas birokrasi. Konteks seperti ini juga bisa dilacak lewat kontestasi Pemilu 2019 di Provinsi Gorontalo. Secara keseluruhan partai pemenang Pemilu ditingkat provinsi maupun kabupaten dan Kota adalah partainya kepala daerah. Khusus untuk Kabupaten Boalemo, sejak dimekarkan menjadi kabupaten definitif hingga pada Pemilu 2019 partai yang memenangkan Pemilu adalah Partainya Kepala Daerah. Hasil data penelitian menunjukkan Sebagian besar preferensi politik ASN yang berada di jajaran struktural dan fungsional guru lebih cenderung pada preferensi perilaku sosiologis dalam menentukan pilihan politik.

B. PERSPEKTIF TEORI

1. Perilaku Sosiologis

Harrop dan Miler (1987: 130), Kavanagh (1983: 53-55) dan Mujani dkk (2012:6) mengemukakan bahwa sejak 1950-an pendekatan sosiologis telah berkembang di Eropa dan Amerika. pendekatan sosiologis atau mazhab Columbia ditandai dengan pertimbangan pilihan politik pemilih dipengaruhi oleh basis kelas pengelompokan sosial dan politik termasuk agama, umur dan sejenisnya. Pendekatan ini, sangat beririsan dengan aspek pengalaman dalam karakteristik individu dan aspek hirarki dan wewenang dalam karakteristik birokrasi. Pendekatan sosiologi selalu memperkuat pengaruh kecenderungan determinist dengan memasukan kelas sebagai basis pengelompokan sosial sekaligus dasar pengelompokan politik termasuk variable agama, umur dan sejenisnya.

Apa yang dikemukakan diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa perilaku pemilih (*Voting Behavior*) dalam konteks pendekatan ini dipengaruhi sistem kepercayaan yang terdiri dari; kepercayaan (*belief*), sikap (*attitude*), maksud (*intention*) dan perilaku (*behavior*) dimana sistem kepercayaan merupakan dasar *role system* yang menjadikannya sebagai *aksen activity*. Ada tiga pendirian terhadap masalah perilaku manusia yang dikenal dengan aksi diri, Interaksi dan Transaksi, Dengan demikian, sikap seseorang individu berhubungan dengan fungsi kepentingan, sikap berdasarkan pada tokoh panutan, serta eksternalisasi atas apa yang diamati dalam kehidupan sehari-hari. Artinya perilaku politik manusia merupakan instrument atas preferensi politik meliputi ide, *feeling*, perasaan dan motif, dimana kepribadian (*personality*) menjadi hal yang sangat penting dalam politik, artinya Pendekatan sosiologi cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosiologi, Konkritnya, perilaku seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, (kota-desa) pekerjaan, pendidikan, kelas dan

pendapatan serta agama. Fred Greenstein (1969) dalam Hamim (2006:15), Nimmo (2001:90), dan Azwar (1998:14).

Antunes, Rui (2010:147-150) bahwa pendekatan perilaku sosiologis menekankan pada aspek asosiasi antara pemilih dengan kelompok sosial tempat mereka berasal. Pada konteks ini, kelompok sosial menjadi milik subjek, pilihan politik mereka berdasarkan pada pilihan politik dan peran yang berdasarkan pada kohesi kelompok. Dari segi kohesi kelompok tersebut terdapat beberapa orang sebagai pemimpin yang membangun hubungan interpersonal antar anggotanya dalam menentukan dukungan dan pilihan politik pada saat Pemilu. Atas hal tersebut, indikator yang dapat dilihat dalam mengidentifikasi perilaku sosiologis pemilih dilihat melalui kecenderungan subyektifitas pemilih berdasarkan prasyarat status sosial, ekonomi, ras, agama, etnis, gender, ketokohan, organisasi masyarakat dan daerah tempat tinggal,

Dari paparan diatas, terlihat bahwa perilaku politik dalam perspektif sosiologis sangat dipengaruhi oleh berbagai hal. *Pertama*, faktor lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, budaya dan media massa, *kedua*, faktor lingkungan sosial langsung mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan dimana hal ini memberikan bentuk-bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor politik serta memberikan pengalaman-pengalaman hidup. *Ketiga* struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu yang memiliki tiga basis fungsional yaitu kepentingan, penyesuaian diri dan pertahanan diri. *Keempat* faktor sosial langsung berupa situasi seperti cuaca, keadaan keluarga, kehadiran seseorang, keadaan lokasi/ruangan, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya.

2. Perilaku Birokrasi Dalam Pemilu

Untuk mengawali perspektif teori perilaku birokrasi dalam Pemilu, landasan utama yang menjadi rujukan dalam mengsingkronkan hal tersebut adalah menggunakan perspektif perilaku organisasi Perilaku organisasi yang terdiri dari sistem, kelompok dan individu. perilaku organisasi tidak bisa terlepas dari pengaruh kekuasaan dan ketergantungan antara bawahan dan atasan. Dengan demikian perilaku politik dalam organisasi tidak dapat dihindari. Namun dalam beberapa literatur tidak menjelaskan secara detail mengapa objek atas kekuasaan dan ketergantungan membuat individu bersikap atas ketergantungannya.

Atas hal tersebut, birokrasi merupakan tatanan sistem dengan tipe ideal rasionalnya yang terdiri dari karakteristik individu dan birokrasi dan memiliki tatanan nilai sebagai kesatuan berdasarkan pada hasil interaksi sistem yang kompleks. Perilaku birokrasi yang dimaksudkan adalah karakteristik individu yang terdiri dari kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman dan pengharapan. Sementara itu, karakteristik kelompok dalam organisasi birokrasi dapat dilihat melalui hirarki, tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem reward dan kontrol. Atas apa yang dikemukakan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku birokrasi merupakan bentuk perpaduan antara interaksi perilaku individu dan perilaku kelompok. Robbins (2015:279-291) dan Thoha (2002 :184-185)

Salah satu pernyataan mendasar yang harus ditelusuri secara serius adalah mengapa perilaku birokrasi tidak netral dalam pemilu dan selalu menjadi mimpi buruk bagi reformasi birokrasi. Apa yang telah ditengarai oleh Beetham (1990) tentang tipe ideal birokrasi yang selalu mengedepankan rutinitas teknis tanpa mengalami keseriusan dalam menerjemahkan independensi dan perilaku birokrasi. Apa yang diikhtiarkan oleh Beetham tersebut menjadi problem bagi netralitas birokrasi saat ini. Studi Martini (2015) mengungkapkan bahwa studi perilaku politik birokrasi dalam Pemilu dari zaman Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi, sebagian besar birokrasi tidak netral dalam Pemilu dan birokrasi dijadikan sebagai alat politik untuk memenangkan salah satu calon kandidat maupun partai politik. Studi tersebut sinkron dengan apa yang dikemukakan oleh Antunes Rui (2010:147-159) jika dikaitkan dengan perilaku politik ASN di Kabupaten Boalemo pada Pemilu 2019 sangat sinkron dengan argumentasi Robbins (2015:279-291) tentang perilaku politik organisasi. Kemenangan partai politik dalam perhelatan demokrasi melalui Pemilu, hal ini ditandai dengan bagaimana cengkeraman kekuasaan kepala daerah dalam memenangkan partai politiknya. Catatan penting yang layak untuk disepakati adalah momentum seperti ini bukan hanya terjadi di Gorontalo namun bagian dari fenomena politik nasional maupun lokal yang tidak dapat hindari.

Hal menarik yang dapat ditelusuri adalah studi Edward, Berenschot (2019) yang membaca demokrasi Indonesia sejak pemilihan secara langsung dimulai sejak 2004 hingga 2019 yang menyimpulkan bahwa ASN dalam hal ini birokrasi tidak memiliki pilihan yang tepat selain harus berpihak pada unsur kekuasaan dimana mereka berafiliasi dengan lingkungan kekuasaan. Hubungannya dengan Pemilu, terdapat tiga faktor yang menjadi preferensi politik ASN dalam Pemilu, diantaranya adalah politisasi birokrasi melalui promosi dan penunjukan jabatan karir, mutasi dan pencopotan jabatan karir, keterlibatan birokrasi dalam kampanye politik, Mobilisasi Pemilihan melalui jejaring birokrasi dan jejaring keluarga serta kerabat dekat dan Peran Kepala Daerah yang memperoleh dukungan aparat birokrasi dan kontrol terhadap sumber daya pemerintahan daerah. Edward, Berenschot (2019 :263-286)

C. METODE

Penelitian ini bertempat di kabupaten Boalemo dengan menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti sebagai instrumen kunci yang tidak bisa diwakili oleh orang lain. Atas dasar ini maka pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah fenomenologis. Artinya peneliti harus memahami arti peristiwa dalam kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang berdasarkan pada pengalaman yang muncul pada kesadaran objek yang diteliti, Moleong (2008:125),Hegel dalam Moustakas (1994:26), Moleong (2007:17) dan Lisa Harrison (2007:19). Atas hal tersebut, ulasan mendasar peneliti dalam menentukan pendekatan fenomenologi untuk menelaah perilaku birokrasi dalam pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo merupakan bagian dari setting alamiah, dimana lingkungan dan peneliti merupakan bagian dari konteks lingkungan yang tidak bisa dipisahkan. Pada konteks ini peneliti tetap menjaga eksistensi berdasarkan pendekatan penelitian yang diangkat dan sesuai dengan apa dialami oleh subjek, artinya tujuan fenomenologi adalah kembali pada realitasnya sendiri.

D. PEMBAHASAN

Sebagai masyarakat sipil, ASN diberikan ruang untuk menentukan pilihan politik setiap Pemilu. Ruang kebebasan dalam memilih tersebut dibatasi untuk keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan politik, keterlibatan dalam kampanye atau sosialisasi politik maupun pernyataan dukungan terhadap calon atau partai peserta Pemilu. Ruang untuk menentukan pilihan politik tidak hanya sebatas pada partisipasinya dalam memilih, namun sikap dalam menentukan pilihan sudah tentu terdapat berbagai pertimbangan sebelum keputusan untuk memilih calon dan partai peserta Pemilu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, birokrasi modern kita masih berjibaku dengan budaya birokrasi patrimonial atau patronase. Kerangka ini kemudian memantapkan karakter individu ASN kedalam budaya birokrasi yang paling tidak merupakan jelmaan dari budaya masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Thoah (2002:185) bahwa sejatinya, substansi dalam memahami perilaku birokrasi lebih utama harus mendeteksi atau memahami perilaku individu birokrasi yang berada dalam organisasi birokrasi itu sendiri. Dengan demikian, setiap perilaku ASN tentunya mengalami fase dan dinamika yang berbeda tergantung dari situasi, kondisi dan lingkungan yang mana ASN akan bersikap.

Dalam hal Pemilu, perilaku ASN akan berbeda dengan perilaku sebelum Pemilu. ASN sebagai individu yang tergabung dalam tatanan sistem birokrasi yang kuat tentunya memiliki sikap dan orientasi atas pertimbangan pilihan politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagai ASN menyadari atas regulasi yang mengatur tentang larangan berpolitik. Namun disisi lain, ASN mempunyai kewajiban sebagai warga Negara untuk terlibat langsung dengan menggunakan hak pilih pada saat Pemilu. Dalam tataran tersebut, ASN akan sulit dalam mengedepankan independensi. Artinya dilain sisi melarang keterlibatan langsung dalam politik di saat Pemilu, namun disisi lain ikut menentukan hak politik.

Pada konteks inilah, orientasi atau pertimbangan perilaku sosiologis dapat digunakan untuk memetakan dorongan atau motif ASN dalam menentukan pilihan politik. Hasil dan temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok ASN dalam menentukan pilihan politik berdasarkan pada pertimbangan perilaku sosiologis. Temuan penelitian tersebut searah dengan apa yang dikemukakan Antunes, Rui (2010:147-150) bahwa Mazhab Columbia dalam

hal ini pendekatan sosiologi, memiliki kecenderungan deterministik terhadap kelas sebagai basis pengelompokan sosial sekaligus dasar pengelompokan politik termasuk preferensi agama, umur dan sejenisnya.

1. Pilihan politik berdasarkan pada pekerjaan sebagai ASN.

Menurut Santoso (2012) Pekerjaan ialah sekumpulan kedudukan (posisi) yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Sementara itu dalam KBBI Online menyebutkan bahwa pekerjaan merupakan tindakan yang dilakukan atau dikerjakan oleh individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hubungannya dengan perilaku ASN dalam menentukan pilihan politik. Aswar (1998:14) mengemukakan salah satu aspek dari pertimbangan dalam menentukan pilihan politik dalam pendekatan atau perilaku sosiologis adalah pekerjaan.

Atas hal tersebut, pekerjaan sebagai ASN di kabupaten Boalemo menjadi pertimbangan utama bagi ASN untuk menentukan pilihan politik dalam memilih calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo. Sebagian besar informan mengemukakan bahwa, sebagai birokrasi dalam hal ini ASN mengungkapkan pilihan politik mereka sangat berkaitan dengan pekerjaan. Unsur ketaatan terhadap perintah dan himbauan atasan dalam struktur birokrasi untuk memilih calon dan partai menjadi prioritas utama ASN dalam pilihan politik.

Pekerjaan sebagai ASN melahirkan sikap dan tindakan ASN dalam memenuhi kebutuhan dan pengharapan hidup. Hal ini tidak terlepas dari apa yang dikemukakan oleh Thoha (2002:185) tentang kebutuhan dan pengharapan sebagai salah satu karakteristik individu yang membentuk perilaku birokrasi. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan maupun pengharapan hidup, perilaku birokrasi dalam Pemilu melandasi pada sisi motif terhadap tindakan dan sikap politik. Pertimbangan kebutuhan serta pengharapan hidup dan pekerjaan melahirkan konsekuensi terhadap pilihan politik yang diambil oleh ASN. Artinya dalam memenuhi kebutuhan dan pengharapan hidup, unsur kepastian, kenyamanan dan lingkungan organisasi birokrasi menjadi prioritas utama bagi ASN. Atas dasar inilah, preferensi politik mereka dalam menentukan pilihan politik lebih mempertimbangkan aspek pekerjaan.

2. Pilihan berdasarkan Kepatuhan Terhadap kepala daerah,

Pasal 1 ketentuan Umum UU No. 32 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah berwenang menjalankan pemerintahan berdasarkan pada asas otonomi daerah. Unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut tergambar dengan jelas bagaimana posisi kepala daerah sebagai pengendali birokrasi di daerah.

Dalam konteks ini, tentunya ada benang merah antara keberadaan kepala daerah dengan pilihan politik ASN yang berorientasi pada aktor atau tokoh sebagai kepala daerah. Kondisi demikian diperkuat oleh budaya paternalistik yang menurut Almond dan Verba (1990) adalah budaya parokial dan kaula, dimana individu dalam menentukan pilihannya mengarah atau mengacu pada tokoh yang berpengaruh di dalam masyarakat itu sendiri. Artinya, apa yang dikemukakan oleh Harrop & Miller (1987) seperti yang diuraikan di atas tentang pertimbangan kelas maka, kelompok birokrasi dalam hal ini ASN merupakan basis kekuatan yang mampu memberikan jaminan terhadap kemenangan calon dan partai pada setiap Pemilu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, selain preferensi pekerjaan, pertimbangan kepala daerah menjadi motif utama ASN dalam menentukan pilihan politik. Seperti apa yang telah diuraikan sebelumnya tentang keberadaan kepala daerah di Kabupaten Boalemo pada setiap periodisasi pelaksanaan Pemilu, partainya pasti memenangkan pertarungan. Fenomena ini dapat digaris bawahi bahwa sebagai kepala daerah memiliki akses langsung terhadap birokrasi maupun sumber daya pemerintahan lainnya.

Apa yang dikemukakan oleh Thoha (2002) tentang hirarki dan wewenang sebagai karakter birokrasi dalam mengejawantahkan perilaku birokrasi menjadi point penting dalam pendekatan ini. Artinya, dengan hirarki sistem dan wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah dapat merepresentasikan pilihan politik ASN pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo. Dengan demikian, asas kepatuhan dan ketaatan ASN menjelma dalam tindakan dan sikap politik ASN dalam menentukan pilihan politik berlandaskan pada pertimbangan keberadaan atau posisi kepala daerah sebagai khalifah di Kabupaten Boalemo.

3. Pilihan berdasarkan pertimbangan Ikatan Keluarga.

Pemilih dalam hal ini ASN pada level ini lebih mempertimbangkan aspek ikatan kekeluargaan dalam menentukan pilihan politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa selain dari dua temuan yang telah dikemukakan di atas, terdapat sebagian ASN dalam menentukan pilihan politik berdasarkan pada preferensi keluarga. Pilihan ini diambil karena terdapat anggota keluarga atau kerabat dekat sebagai kontestan dari partai lain selain partainya Bupati sebagai kepala daerah.

Pada konteks ini, Mujani, dkk (2012) mengemukakan bahwa pemilih dalam pendekatan perilaku sosiologis selain mempertimbangkan kelas sosial dan agama kelas sosial seperti keluarga menjadi prioritas pemilih dalam menentukan hak politiknya. Apa yang dikemukakan tersebut sesuai dengan pendapat Aswar (1998) bahwa latar belakang demografi dan sosial ekonomi, artinya, aspek keluarga merupakan salah satu pertimbangan perilaku sosiologis dalam menentukan pilihan politik.

Kaitannya dengan temuan penelitian, pertimbangan keluarga sebagai determinan ASN dalam menentukan pilihan politik yang menurut Almond dan Verba (1990) lebih spesifik pada aspek kaula. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi bagi ASN di kabupaten Boalemo. Secara keseluruhan temuan penelitian khususnya menyangkut pertimbangan pilihan politik bagi masyarakat Indonesia lebih cenderung pada pertimbangan kepala keluarga. Data tersebut ketika dikaitkan dengan karakteristik individu maka, nilai kepercayaan seperti yang dikemukakan oleh Thoha (2020) menjadi indikator utama bagi ASN dalam menentukan pilihan politik mereka. Ikatan nilai secara emosional tersebut sangat sulit untuk diubah bila dibandingkan dengan temuan sebelumnya. Dengan demikian, preferensi politik ASN di Kabupaten Boalemo dipengaruhi oleh pertimbangan ikatan keluarga.

4. Pilihan berdasarkan pertimbangan afiliasi dengan organisasi kemasyarakatan.

Selain sebagai ASN yang tergabung dalam organisasi formal Negara, kebebasan ASN dalam berafiliasi dengan organisasi non-formal seperti organisasi kemasyarakatan menjadi hak fundamental bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Berkecimpung ASN dalam organisasi lain selain birokrasi, tentunya memiliki nilai dan pengalaman yang berbeda, apalagi diantara keduanya sama-sama merepresentasikan kepentingan masyarakat.

ASN pada konteks seperti ini dalam menentukan pilihan politiknya berdasarkan pada pertimbangan emosional antara kedekatan yang bersangkutan dengan afiliasi organisasi kemasyarakatan. Artinya. Ketika ASN berafiliasi dengan organisasi Muhammadiyah maka preferensi politiknya lebih dekat dengan PAN, namun bagi ASN yang berafiliasi dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) pastinya pilihan politik berdasarkan pada partai yang memiliki basis Islam tradisional seperti PPP, PKB dan lain sebagainya. Namun bagi partai Islam moderat, PKS menjadi rujukan utama dalam persoalan pilihan politik.

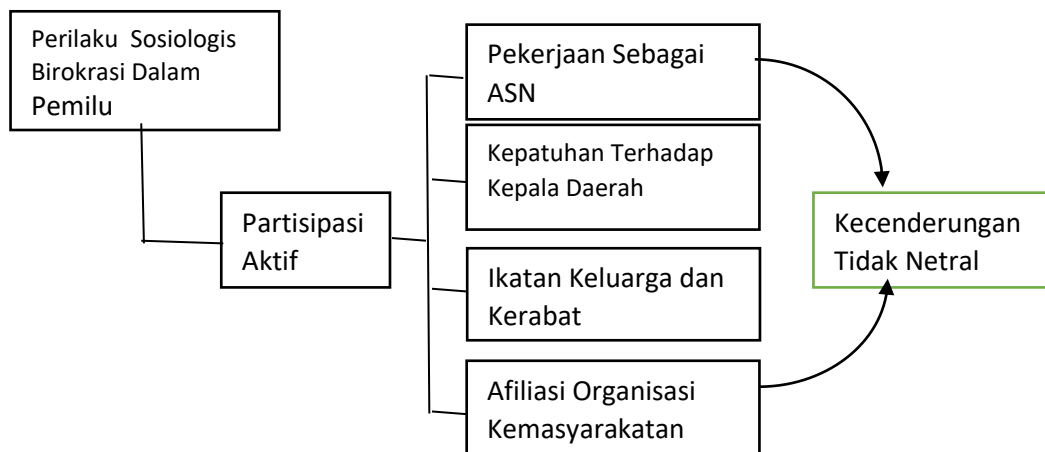
Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian ASN menunjukkan pilihan politik berdasarkan pada pertimbangan kedekatannya dengan organisasi masyarakat. Afiliasi atas sikap dan pilihan politik lebih berorientasi pada kedekatan ASN dengan organisasi kemasyarakatan. Artinya apa yang dikemukakan oleh Harrop & Miller (1987) tentang kecenderungan perilaku sosiologis yang deterministik terhadap basis pengelompokan sosial. Dengan bahasa lain, basis pengelompokan sosial yang memiliki pengaruh fundamental adalah kedekatan secara emosional antara ASN di kabupaten Boalemo dengan afiliasi organisasi kemasyarakatan lainnya.

Menyikapi hal tersebut, apa yang diidentifikasi oleh Thoha (2002), pengalaman individu merupakan bagian dari karakter bawaan ASN dalam organisasi birokrasi. Terdapat nilai yang saling bertentangan antara apa yang didapatkan oleh ASN dalam organisasi birokrasi dengan organisasi kemasyarakatan. Dalam fenomena ini, ASN lebih mempertimbangkan organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan pada afiliasi sosialnya bila dibandingkan dengan pertimbangan organisasi birokrasi. Pada point tertentu dapat dipahami bahwa, sebagian ASN di Kabupaten Boalemo dalam menentukan pilihan politiknya lebih mempertimbangkan afiliasi ASN dengan organisasi kemasyarakatan bila dibandingkan dengan organisasi birokrasi.

Berdasarkan pada argumentasi di atas, apa yang dikemukakan oleh Antunes, Rui (2010) tentang deterministik kelas sebagai pengelompokan kelompok sosial sebagai representasi sikap politik, Mujani Dkk. (2012) dan Aswar (1998) yang menekankan pada aspek demografi dan

sosial ekonomi sebagai pertimbangan politik dapat tergambarkan secara jelas pada pembahasan di atas. Disisi lain apa yang dikemukakan oleh Thoah (2002), tentang perilaku birokrasi beririsan dengan pendekatan perilaku sosiologis yang lebih mengarah pada karakteristik individu diantaranya kebutuhan, kepercayaan, pengalaman dan pengharapan serta karakteristik birokrasi antara hirarki dan wewenang menjadi deterministik perilaku sosiologis birokrasi dalam hal ini ASN dalam menentukan pilihan politik untuk memilih calon dan partai pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Boalemo dalam Pemilu 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam ilustrasi model empirik pada gambar berikut :

Model Empirik Perilaku Sosiologis ASN Dalam Pemilu:



E. PENUTUP

Kecenderungan ketidaknetralan birokrasi dalam Pemilu dipengaruhi oleh beberapa ragam masalah, salah satunya adalah perilaku politik mereka dalam menentukan pilihan politik. hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan ASN yang berada dalam jajaran struktural dan fungsional guru lebih terpola pada pertimbangan perilaku politik sosiologis bila dibanding dengan perilaku politik lainnya. Diantara pertimbangan tersebut antara lain adalah a) pekerjaan sebagai ASN, pengharapan bagi ASN yang berada dalam jajaran pemerintahan daerah adalah posisi dan kenyamanan mereka untuk bekerja. Dengan sistem kontrol atasan serta hirarki perintah akan membuat ASN semakin terpola untuk mengikuti arahan dari atasan b) Kepatuhan terhadap Kepala Daerah, bagi ASN, dimana posisi dan keberadaan kepala daerah mereka akan terpola dan mendukung calon yang berasal dari partai politik kepala daerah; c) Ikatan Keluarga dan kerabat, ditandai dengan adanya kedekatan secara emosional antara ASN dengan ikatan keluarga membuat kecenderungan ASN mendukung calon dari partai tertentu; d) afiliasi organisasi kemasyarakatan, afiliasi ASN dengan kelompok organisasi masyarakat tertentu mempengaruhi preferensi politik mereka dalam menentukan pilihan politik.

F. Sumber Bacaan

- Antunes, Rui. "Theoretical models of voting behaviour". *Exedra* 4 (2010) : 145-170. Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Coimbra. Published <http://exedra.esec.pt/docs/N4/10C>
- Azwar, S. 2011. Sikap dan Perilaku. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya (Edisi 2). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Beetham David. 1990. Birokrasi. Jakarta : Bumi Aksara
- Edward Aspinall, Ward Berenschot. 2019. *Democracy For Sale*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Harrison Lisa, 2007. Metodologi Penelitian Politik, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hamim Udin 2006. Perilaku memilih Etnis Gorontalo Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Tidore Kepulauan. (Tesis Program Studi Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana UGM)

- Kavanagh Deenis, 1983. *Political Science and Political Behavior*. London : Keorge Allen and Invin
- Lay Cornelis, 1998. Birokrasi Indonesia. Perspektif Pemerintahan, JIP FISIPOL UGM
- Martini Rina . Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. Jurnal Ilmu Sosial Vol. 14. No. 1 Juli 2015
- Miller & Martin Harrop. 1987. *Elections And Voters a Comparative Introduction*. MacMillan Press
- Moleong Lexy 2007a. Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Moleong Lexy .2008b. Penelitian kualitatif. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moustakas Clark, 1994. "*Phenomenological Research Methods*", (California: SAGE Publications
- Mujani, Saiful, dkk. 2012. "Kuasa Rakyat". Bandung: Mizan
- Nimmo. 2001. Komunikasi Politik, Bandung : Rosdakarya
- Robbins Stephen, Judge, 2015. Perilaku organisasi, *organizational behavior*. Salemba Empat.
- Santoso Budi, 2012. Definisi Pekerjaan. <https://inisantoso.wordpress.com/2012/09/25/definisi-pekerjaan/> diakses : 7 Juli 2021 Pukul. 16.00 Wita
- Thoha Miftah, 2002 a. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada